

**PENGUATAN PEMAHAMAN KONSEP MASYARAKAT ASEAN DI KALANGAN
APARATUR KELURAHAN KOTA SURAKARTA**

Oleh:

Ignatius Agung Satyawan, Salieg Luki Munestri, Lukman Fahmi Djarwono

Pusat Studi ASEAN LPPM UNS

agungsatyawan@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, the ASEAN Community supported by three pillars: political-security, economy and social-cultural pillars have come into force since the end of 2015. Entry into force of the ASEAN Community is automatically binding on all government and society in ASEAN, including in Surakarta. Some preliminary studies indicate that there are still many government officials do not understand the concept of the ASEAN Community. Village as well as sub-district officials are most strategic unit because they are dealing directly with the public. Therefore, strengthening the understanding among village and sub-district officials is important so that the concept of ASEAN Community can be clearly understood by the society and they are expected to obtain benefit from the ongoing ASEAN Community.

Key words: ASEAN Community, ASEAN Economic Community, local government, small scale enterprise.

PENDAHULUAN

Memasuki abad 21 para pemimpin ASEAN bersepakat untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang terbuka, makmur, damai dan stabil serta bangsa-bangsa yang terhimpun didalamnya mempunyai saling kepedulian dan kemitraan guna meraih kesejahteraan bersama (Amri, 2013). Kesepakatan ini kemudian tertuang dalam Visi ASEAN 2020 yang mendasari terbentuknya Masyarakat ASEAN.

Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya serta harus terbentuk dan berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Meskipun tiga pilar ini berbeda fokus, masing-masing pilar tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya saling mempengaruhi. Kegagalan di salah satu pilar akan berakibat rapuhnya pilar yang lainnya dan dapat meruntuhkan bangunan Masyarakat ASEAN.

Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN mempunyai tujuan bahwa

warga Asia Tenggara harus dijamin kehidupannya dalam situasi yang aman, damai dan terjamin pula hak-haknya termasuk hak asasi manusia. Situasi semacam ini akan lebih mudah terwujud dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sementara itu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Asia Tenggara akan menjadi pasar tunggal untuk berbagai barang dan jasa. Tidak hanya sebagai pasar, kawasan Asia Tenggara pun menjadi produsen tunggal berbagai komoditi. Terbukanya pasar berpeluang untuk dimanfaatkan meraih kesejahteraan sebagai prasyarat tumbuh suburnya nilai-nilai demokrasi. Sedangkan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN akan menjadi penyeimbang kedua pilar ini. Pada Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN ini interaksi *people-to-people* harus ditingkatkan sehingga akan tercipta *civil-society* di Asia Tenggara (Luhulima & Anwar, 2008).

Pada sisi lain, kesiapan Indonesia dalam memasuki Masyarakat ASEAN, terutama pilar Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA), tidak selalu bergantung dari pemerintah pusat. Justru yang paling penting adalah kesiapan di tataran pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota dan bahkan di level kelurahan karena potensi ekonomi maupun kebijakan otonomi berada di daerah. Disamping itu, berdasarkan Undang Undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan bahwa meskipun Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara utama hubungan luar negeri, setiap komponen bangsa juga mempunyai peran dalam melakukan kegiatan hubungan luar negeri termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat maupun warga negara secara pribadi.

Ada fakta ironis yang berkaitan dengan keberadaan ASEAN. Sebuah survai merilis bahwa 80% penduduk di ibukota - ibukota ASEAN telah familiar tentang nama ASEAN. Tetapi 76% total penduduk ASEAN masih belum paham apa itu ASEAN (Dirjen Kerjasama ASEAN, 2013). Hal yang lebih

mengkhawatirkan adalah gaung tentang Masyarakat ASEAN, terutama MEA ternyata masih minim di Indonesia (Viva-news, 7 Januari 2014).

Penelitian Budiarjo dan Son Haji (2014) mengenai kesiapan aparat Pemerintah Solo dalam menyongsong MEA menemukan bahwa pemahaman terkait ASEAN dan Masyarakat ASEAN masih memprihatinkan. Aparat yang diteliti adalah aparat yang berkaitan langsung dengan MEA antara lain Dinas Tenaga kerja, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Bappeda. Meskipun hampir semua aparat telah mempunyai pengetahuan dasar tentang MEA, mereka masih belum cukup gambaran yang komprehensif bagaimana implementasi MEA di lingkup kerjanya masing-masing. Apalagi belum banyak bimbingan teknis yang dilakukan oleh instansi di atasnya, dalam hal ini pemerintah pusat, kepada aparat di daerah.

Berdasar fenomena yang ditemui dari penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa aparat

pemerintah daerah, khususnya di Surakarta, masih minim pemahaman tentang Masyarakat ASEAN. Padahal ketika MEA diberlakukan, dampak langsungnya akan mengenai para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mereduksi dampak negatif diberlakukannya Masyarakat ASEAN adalah mempersiapkan dan menguatkan aparat pemerintah daerah, terutama aparat yang berhadapan langsung dengan masyarakat yakni aparat kecamatan dan kelurahan. Aparat kelurahan mempunyai posisi strategis karena mereka adalah pejabat yang berada pada level terbawah dari struktur pemerintah dan berkaitan langsung dengan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ceramah dan diskusi kelompok. Ceramah disampaikan oleh narasumber dari Pusat Studi ASEAN Universitas

Sebelas Maret dan staff dari Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Adapun secara garis besar tahapan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut. Pertama, menghubungi Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri untuk diajak bermitra melaksanakan kegiatan penguatan aparatur kelurahan tentang MEA. Kemitraan ini disetujui karena sudah ada MoU antara Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN dengan Universitas Sebelas Maret. Pihak Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN membantu menyediakan bahan-bahan/materi tentang ASEAN dan mengirim staffnya untuk membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kedua, mengirim surat permohonan kemitraan kepada Pemerintah Kota Surakarta dan mendapat dukungan positif dan institusional secara tertulis. Surat kemitraan ini diperlukan untuk justifikasi bahwa kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Kota Surakarta,

terutama untuk perijinan melakukan *need assessment* di kelurahan-kelurahan.

Ketiga, membentuk tim pelaksana yang akan melakukan *need assessment* dan memformulasikan materi untuk pegangan peserta. *Need assessment* ini bertujuan untuk menggali informasi dikalangan kelompok sasaran yakni aparatur kelurahan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang mereka perlukan dalam menghadapi Masyarakat ASEAN, khususnya MEA. Kegiatan ini dilakukan di lima kecamatan dengan mengambil sampel 2 kelurahan di tiap-tiap kecamatan. Sampel kelurahan yang terpilih didasarkan rekomendasi dari pihak kecamatan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahap awal kegiatan ini adalah melakukan peta kebutuhan dikalangan aparat kelurahan tentang isu Masyarakat ASEAN terutama pilar

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Melalui kegiatan *need assessment*, maka dapat diketahui tingkat pengetahuan aparat kelurahan tentang isu MEA dan apa yang mereka butuhkan serta harapannya tentang isu ini bagi kelurahan masing-masing.

Need assessment dilakukan dengan mewawancarai pihak kecamatan (camat atau sekretaris kecamatan) di 5 Kecamatan Surakarta yakni: Banjarsari, Laweyan, Serengan, Pasarkliwon dan Jebres. Kemudian tiap-tiap kecamatan di ambil dua kelurahan untuk diwawancarai. Sama seperti kecamatan, untuk kelurahan yang diwawancarai adalah lurah atau sekretaris kelurahan.

Berdasarkan kegiatan *need assessment* itu, maka dapat diketahui hal-hal berikut ini: Pertama, semua aparat kelurahan maupun kecamatan mengetahui dan pernah mendengar tentang MEA. Kedua, ditilik lebih lanjut, pengetahuan tentang MEA tidaklah merata dan pada umumnya hanya pengetahuan dipermukaan saja.

Mereka menyadari bahwa MEA tidak dapat dihindari dan akan membawa dampak positif maupun negatif. Ketiga, mereka bersepakat bahwa dampak negatif MEA harus ditangkal sehingga efek negatif tersebut dapat diupayakan seminimal mungkin.

Sementara itu, temuan keempat adalah terdapatnya warga kelurahan yang sudah dilatih tentang MEA oleh Dinas Perdagangan dan Industri, terutama terutama strategi dagang agar barang komoditi mereka dapat menembus pasar ASEAN. Kelima, aparat kelurahan menyadari bahwa sebagian besar warganya tidak banyak tahu tentang MEA dan akibatnya mereka tidak begitu peduli dengan isu ini. Keenam, aparat menginginkan adanya informasi yang memadai tentang isu MEA, dan kalau perlu informasi ini juga tersedia di kantor kelurahan sehingga warga dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah, misalnya dengan pemasangan poster, brosur, majalah dan sebagainya. Ketujuh, kegiatan peningkatan

kapasitas sangat diperlukan, terutama mengenai hal-hal baru mengenai MEA setelah diberlakukan sejak awal tahun 2016. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas perlu menyajikan informasi yang *up-to-date* namun dikemas secara ringkas dan mudah dipahami. Pemahaman MEA di kalangan aparat kelurahan akan menjadi penting karena mereka ini pada akhirnya menjadi tempat bertanya bagi warganya.

Setelah semua informasi dari *need assessment* terkumpul, maka disusunlah materi pegangan untuk para peserta dalam memahami MEA. Kemudian pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini adalah Bagian Pemerintahan. Koordinasi ini difokuskan pada teknis pelaksanaan kegiatan dan penyebaran undangan kepada para peserta.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 di Hotel Lorin Solo dengan para peserta terdiri oleh semua perwakilan kelurahan dan kecamatan di Surakarta. Acara dibuka

oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang menyampaikan sambutan tertulis dari Walikota Surakarta. Walikota menyambut baik kegiatan ini seraya mengharapkan aparatur kecamatan dan kelurahan dapat menjadi tuan rumah yang baik di era MEA mengingat dalam waktu tidak lama lagi banyak investor maupun tenaga kerja atau pelancong asing akan berdatangan di Kota Surakarta.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi ASEAN LPPM UNS menyampaikan materi tentang arti penting ASEAN bagi Indonesia. Ditegaskan bahwa ASEAN telah menjadi fokus utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sejak ASEAN didirikan tahun 1967. Melalui ASEAN ini stabilitas dan perdamaian dikawasan Asia Tenggara dapat terjaga yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia.

Isu MEA terkini disampaikan oleh Kasubdit Kerjasama Ekonomi, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. Aspek positif MEA yang belum banyak diketahui adalah justru dengan adanya

MEA ini membuka peluang bagi para pelaku usaha karena pasar akan menjadi lebih besar. Melalui pasar yang terbuka dan tanpa hambatan ini, barang, jasa dan manusia dapat bergerak bebas. Hal ini patut menjadi tantangan terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Bahkan UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang telah terkenal tahan uji dari setiap gejolak gelombang ekonomi global. Ketika Indonesia mengalami masa krisis ekonomi tahun 1998, UMKM inilah yang menjadi jangkar penyelamat ekonomi Indonesia.

Pada sisi lain, patut disadari bahwa banyak pula UMKM yang mempunyai daya saing lemah. Padahal jika akan memasuki pasar internasional, produk UMKM harus mempunyai kualitas dan ketepatan dalam pengiriman barang sehingga mendapat kepercayaan konsumen. Hanya dengan cara ini, produk UMKM dapat

menembus pasar ASEAN bahkan pasar internasional.

Untuk menjadi UMKM yang unggul dan berdaya saing tinggi maka syarat mutlak yang harus dilakukan oleh UMKM adalah mengembangkan sinergi dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, perguruan tinggi dan lebih penting lagi adalah peran perusahaan besar untuk membina UMKM yang berada disekitarnya. Oleh karena itu, pihak Dinas Koperasi dan UMKM harus menjadi mediator yang menghubungkan pelaku UMKM dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok, para peserta sebagai aparat pemerintah di daerah siap melaksanakan program yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat, termasuk menyukseskan Indonesia dalam memasuki era MEA. Namun demikian, mereka memerlukan *up-date* informasi terkini tentang perkembangan ASEAN dari berbagai pihak, terutama dari pihak Kementerian

Luar Negeri dan perguruan tinggi. Informasi terkini ini penting bagi aparat kelurahan untuk diteruskan kepada warganya, terutama bagi warga yang bermata pencarian di sektor UMKM maupun bagi warga yang akan berkerja di luar negeri (TKI/TKW). Selain itu mereka juga bersepakat apabila salah satu kelurahan memperoleh tambahan baik informasi ataupun data terbaru mengenai ASEAN, maka informasi atau data ini akan dibagikan ke kelurahan lainnya melalui mekanisme rapat yang diadakan secara rutin di balai kota.

KESIMPULAN

Aparat kecamatan dan kelurahan mempunyai posisi strategis dalam memanfaatkan peluang MEA bagi pelaku usaha di wilayahnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, aparat ini memerlukan pemahaman yang komprehensif dan *up-to-date* mengenai isu yang berkaitan dengan ASEAN maupun MEA sehingga mereka dapat

memberi arahan dan memotivasi warganya.

Aspek penting yang diharapkan oleh aparat kecamatan maupun kelurahan adalah sinergi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan antara lain dinas terkait, perguruan tinggi dan pelaku usaha terutama pengusaha besar dalam membina UMKM di wilayahnya. Disamping itu, penyediaan informasi terkini dan mudah dipahami terkait dengan isu ASEAN maupun MEA amat diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari bantuan dan peran-serta berbagai pihak. Pada kesempatan ini dihaturkan ucapan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan jajaran Pemerintah Kota Surakarta.



Sumber: Dokumentasi pribadi
Foto Pelaksanaan Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., et. al. 2010. The Understanding of Idealization and Conceptualization of ASEAN Community: Comparative Study between Malaysia and Indonesia. *Tamkang Journal of International Affairs*. Vol. 14, No. 11, hal.91 - 129
- Acharya, A. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, London: Routledge.
- Amri, I. S. 2013. "Komunitas Ekonomi ASEAN 2015", <http://konstruksiindonesia.net/file/KI2013.pdf>
- ASEAN Secretariat. 2009. *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*. Jakarta.
- ASEAN Secretariat. 2009. *ASEAN Annual Report, Implementing the Road Map For An Asean Community 2015*. Jakarta
- Budiarjo & Son Haji. 2014. *Kesiapan Pemerintah Lokal dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Surakarta*. Hibah Penelitian Start-Up LPPM UNS. Tidak diterbitkan.
- Checkel, J. T. 2008. "Constructivism and Foreign Policy", dalam Smith, S. (ed.). *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford University Press.
- Direktorat Jendral Kersama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. 2013. *Pedoman Penyusunan Proposal Proyek Pemanfaatan Trut Fund dan Project Fund yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN*, Jakarta.
- Dirjen Kerjasama ASEAN: Peluang dan Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015. 24 Juli 2013. <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Dirjen-Kerjasama-ASEAN-Peluang-dan-Tantangan-Menuju-Komunitas-ASEAN-2015-13659-id.html>
- Gonggong, A. 2009. Peran pemerintah dalam "mewujudkan" social welfare and protection dalam menyikapi Asean social-culture community. *Administratio*, Vol. 3, No. 7, hal.611-616.
- Haqqi, H. 2011. Peluang dan tantangan pengembangan potensi daerah melalui Komunitas Asean 2015. *Ejurnal Unisri*, Vol. 14, No. 21, hal. 63-68. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/217>
- Luhulima, C. P. F. dan Anwar, D. F. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015*. P2P-LIPI-Pustaka Pelajar, Jakarta dan Yogyakarta.
- Severino, R. C. 2004, *Southeast Asia in search of an ASEAN Community*. Singapore: ISEAS
- Soesastro, H. 2005. "ASEAN Economic Community: Concepts, Costs and

- Benefits” dalam Denis Hew, (Ed.). *Roadmap to an ASEAN Economic Community*. Singapore: ISEAS.
- Terence Chong and Stefanie Elies. 2011. *An ASEAN Community for All*. Friedrich-Ebert-Stiftung, Singapore.
- Viva-news. 7 Januari 2014. Tahun Ini Indonesia Fokus Persiapkan "Komunitas ASEAN 2015" Namun sosialisasi Komunitas ASEAN ke masyarakat masih belum merata. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/471455-tahun-ini-indonesia-fokus-persiapkan--komunitas-asean-2015>
- Wendt, A. 1999. *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press.
- Malaysia. Pendidikan non gelar yang pernah diikuti antara lain: *Electoral Studies* di Manila-Filipina, *Tourism and Development* di Haifa-Israel, *Gender and Reproductive Health* di Bangkok-Thailand. Selain itu, pernah mengikuti program *visiting scholar* di bidang Politik Internasional yang disponsori oleh UNESCO dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Peking University-Beijing selama satu tahun.

BIO DATA KETUA PENGABDI

Ignatius Agung Satyawan adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret dan Kepala Pusat Studi ASEAN LPPM UNS. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, S1 Manajemen di Universitas Terbuka, S1 Ilmu Komunikasi juga di Universitas Terbuka, S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan S3 *International Studies* di Universiti Utara

